

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 09
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Januari 2015
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas mengenai tenaga penyuluh
Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 34 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Si. (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Tachir Fathoni, M.Sc. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
3. Dr. Ir. Suseno, MM (Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas mengenai tenaga penyuluh pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menambah kekurangan tenaga penyuluh dengan mengangkat penyuluh non PNS menjadi PNS dan meminta kepada Pemerintah agar tidak melakukan moratorium terhadap penerimaan tenaga penyuluh PNS sampai terpenuhi kebutuhan tenaga penyuluh PNS secara nasional.
2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan untuk memprioritaskan usulan pengangkatan dan penambahan formasi tenaga penyuluh pada tahun 2015. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan mengenai penambahan anggaran untuk penguatan kelembagaan penyuluhan, serta menerima usulan peningkatan dan penyesuaian honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Petugas Lapangan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), dan Tenaga Penyuluh Perikanan Bantu. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, salah satunya dengan meningkatkan sistem informasi secara terpadu sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkoordinasikan ketiga lembaga penyuluhan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh serta meningkatkan efektivitas dan kapasitas tenaga penyuluh yang ada sesuai dengan potensi wilayah kerjanya masing-masing.
6. Komisi IV DPR RI menerima usulan Pemerintah untuk mengsinkronisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dibahas di Badan Legislasi DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.35 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM., MBA

A-335

KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN,

Ttd.

KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEHUTANAN,

Ttd.

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

Ttd.

DR. IR. WINNY DIAN WIBAWA, M.SI.

DR. IR. TACHIR FATHONI, M.SC.

DR. IR. SUSENO, MM

- ~~1. Komisi IV DPR RI tidak menyetujui rencana untuk menempatkan personel TNI sebagai tenaga penyuluh pertanian, dan meminta Pemerintah memprioritaskan untuk merekrut tenaga penyuluh dari SDM yang berkompeten di bidangnya.~~